

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, 25 April 2017
Kepala,

Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
VI. Lampiran	



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 25 April 2017

Kepala,

Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si

NIP 19630605 198702 1001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp74.240.034.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp29.380.389.318 atau mencapai 82,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp35.678.556.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp40.891.373.283 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp86.623.923; Aset Tetap (neto) sebesar Rp40.181.205.612; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp623.543.748.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp422.646.821 dan Rp40.468.726.462.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp30.586.289, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp31.600.335.638 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp31.569.749.349. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp81.334.950 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar

Rp31.488.414.399.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp54.979.944.389 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp31.488.414.399 dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp2.985.794.976 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp19.962.991.448 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp40.468.726.462.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPS PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	74.240.034	0,00	75.468.627
JUMLAH PENDAPATAN		-	74.240.034	0,00	75.468.627
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	12.970.663.000	12.421.551.812	95,77	11.749.652.439
Belanja Barang	B.4	21.155.893.000	15.532.374.506	73,42	23.449.833.169
Belanja Modal	B.5	1.552.000.000	1.426.463.000	91,91	4.377.955.305
JUMLAH BELANJA		35.678.556.000	29.380.389.318	82,35	39.577.440.913

II. NERACA

**BPS PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	86.623.923	6.153.874.556
Jumlah Aset Lancar		86.623.923	6.153.874.556
ASET TETAP			
Tanah	C.2	21.940.500.000	21.940.500.000
Peralatan dan Mesin	C.3	19.909.622.756	24.746.068.911
Gedung dan Bangunan	C.4	15.278.493.635	14.598.654.294
Aset Tetap Lainnya	C.5	769.017.904	670.128.608
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(17.716.428.683)	(15.884.691.610)
Jumlah Aset Tetap		40.181.205.612	46.070.660.203
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.7	3.985.377.230	3.156.323.730
Aset Lain-Lain	C.8	853.171.311	1.217.803.264
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(4.215.004.793)	(1.208.160.000)
Jumlah Aset Lainnya		623.543.748	3.165.966.994
JUMLAH ASET		40.891.373.283	55.390.501.753
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	422.646.821	410.557.364
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		422.646.821	410.557.364
JUMLAH KEWAJIBAN		422.646.821	410.557.364
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	40.468.726.462	54.979.944.389
JUMLAH EKUITAS		40.468.726.462	54.979.944.389
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		40.891.373.283	55.390.501.753

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPS PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	30.586.289	24.512.724
JUMLAH PENDAPATAN		30.586.289	24.512.724
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	12.431.855.242	11.825.503.287
Beban Persediaan	D.3	519.597.615	2.029.684.973
Beban Barang dan Jasa	D.4	9.235.955.142	5.556.973.770
Beban Pemeliharaan	D.5	915.678.698	1.010.989.318
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.056.573.073	13.748.540.063
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		-	324.287.330
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	3.440.675.868	3.213.343.671
JUMLAH BEBAN		31.600.335.638	37.709.322.412
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(31.569.749.349)	(37.684.809.688)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		27.356.666	(216.068.082)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		53.978.284	(64.071.160)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		81.334.950	(280.139.242)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(31.488.414.399)	(37.964.948.930)
SURPLUS/DEFISIT LO		(31.488.414.399)	(37.964.948.930)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPS PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	E.1	54.979.944.389	41.901.968.688
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(31.488.414.399)	(37.964.948.930)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	(121.165.785)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(2.985.794.976)	(37.296.246)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		(2.985.794.976)	(158.462.031)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	19.962.991.448	51.201.386.662
EKUITAS AKHIR	E.5	40.468.726.462	54.979.944.389

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Provinsi Jawa Tengah

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

RENCANA STRATEGIS BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2016-2019, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dalam menetapkan rencana strategis Tahun 2016-2019 mengacu Renstra BPS Tahun 2016-2019.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean government* tersebut. Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Provinsi Jawa Tengah yang berlaku selama kurun waktu 2016-2019.

VISI :

“Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua.”

“The Agent of trustworthy statistical data for all”

MISI BPS :

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Provinsi Jawa Tengah yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegrasi dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

SASARAN STRATEGIS BPS :

1. Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu diseluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data informasi statistik;
2. Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan *good governance* serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS;
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna penyempurnaan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik;
4. Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional;
5. Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik.

Program/Kegiatan Unggulan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 adalah :

1. SENSUS EKONOMI 2016.

Organisasi dan Tata Kerja Pada Badan Pusat Statistik

Organisasi dan Tata Kerja, diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.

TUPOKSI di Badan Pusat Statistik adalah :

1. Kedudukan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.

- a. BPS Provinsi Jawa Tengah adalah perwakilan BPS di daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada BPS.
- b. BPS Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas Pokok

BPS Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan Statistik dasar di Provinsi.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi.
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Provinsi.

4. Kewenangan

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPS Provinsi mempunyai kewenangan :

- a. Penyusunan rencana daerah di Kabupaten/Kota secara makro di bidang statistik.
- b. Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Penetapan Sistem Informasi Statistik di Provinsi Jawa

Tengah.

- d. Penetapan dan Penyelenggaraan statistik nasional di Provinsi.
- e. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

No	Jenis Jabatan Pimpinan	Nama Pejabat
1	Kepala	: Dr MARGO YUWONO, S.Si, M.Si
2	Kepala Bagian Tata Usaha	: ATAS PARLINDUNGAN LUBIS, S.Si, M.Si
3	Kepala Bidang Statistik Sosial	: ERISMAN, M.Si
4	Kepala Bidang Statistik Produksi	: TOTOK TAVIRIJANTO, S.Si
5	Kepala Bidang Statistik Distribusi	: SRI HERAWATI, S.Si, MM
6	Kepala Bidang Nerwilis	: SAMIRAN, S.Si, MT
7	Kepala Bidang IPDS	: MARSUDIJONO, S.Si, MM

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada BPS Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2016 sebanyak 110 orang yang dapat diuraikan menurut (1) Jabatan dan (2) Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

(1) menurut jabatan:

Jabatan	Jumlah	%
Kepala	1	0,91
Kepala Bagian Tata Usaha	1	0,91
Kepala Bidang	5	4,55
Kepala Sub bagian	5	4,55
Kepala Seksi	15	13,64
Staf Subbag/Seksi	83	75,45
Jumlah	110	100,00%

(2) menurut tingkat pendidikan:

Pendidikan	Jumlah	%
S. 2	16	13,33
D. IV/ S. 1	70	58,33
D. III/ Sarmud	13	10,83
SLTA	19	15,83
SLTP	1	0,83
SD	1	0,83
Jumlah	110	100,00%

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset

tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

BPS Provinsi Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata

uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan

sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam

Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja		
Belanja Pegawai	11.447.493.000	12.970.663.000
Belanja Barang	28.367.317.000	21.155.893.000
Belanja Modal	1.653.730.000	1.552.000.000
Jumlah Belanja	41.468.540.000	35.678.556.000

Realisasi

Pendapatan

Rp74.240.034

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp74.240.034. Pendapatan BPS Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	-	57.942.955	-
Pendapatan Lain-lain	-	16.297.079	-
Jumlah	-	74.240.034	-

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta

Pendapatan dari Penjualan TA 2016 mengalami penurunan 10,06 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari pemindahtanganan BMN yaitu lelang kendaraan dinas serta pendapatan dari penjualan publikasi BPS. Selain itu, Pendapatan Lain-lain BPS Provinsi Jawa Tengah mengalami sebesar kenaikan 47,55 persen yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai yang berasal dari tahun anggaran yang lalu dan pendapatan sewa.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	57.942.955	64.423.137	-10,06
Pendapatan Lain-lain	16.297.079	11.045.490	47,55
Jumlah	74.240.034	75.468.627	-1,63

Realisasi

Belanja Negara

Rp29.380.389.318

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2016 adalah sebesar Rp29.380.389.318 atau 82,35% dari anggaran belanja sebesar Rp35.678.556.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	12.970.663.000	12.435.762.877	95,88
Belanja Barang	21.155.893.000	15.571.015.961	73,60
Belanja Modal	1.552.000.000	1.426.463.000	91,91
Total Belanja Kotor	35.678.556.000	29.433.241.838	82,50
Pengembalian	-	(52.852.520)	-
Jumlah	35.678.556.000	29.380.389.318	82,35

Dibandingkan dengan TA 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar 25,65% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pembatasan belanja barang dikarenakan adanya penghematan anggaran TA 2016 sesuai dengan Instruksi Presiden RI No 4/2016 dan No 8/2016,
2. Adanya *selfblocking* anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12.435.762.877	11.751.081.177	5,83
Belanja Barang	15.571.015.961	23.458.739.169	(33,62)
Belanja Modal	1.426.463.000	4.377.955.305	(67,42)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	29.433.241.838	39.587.775.651	(25,65)

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp12.421.551.812

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp12.421.551.812 dan Rp11.749.652.439. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,72 persen dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12.410.866.877	11.751.081.177	5,61
Belanja Lembur	24.896.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	12.435.762.877	11.751.081.177	5,83
Pengembalian Belanja Pegawai	(14.211.065)	(1.428.738)	894,66
Jumlah Belanja	12.421.551.812	11.749.652.439	5,72

Belanja Barang

Rp15.523.374.506

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp15.523.374.506 dan Rp23.449.833.169. Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami penurunan 33,76% dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja perjalanan dinas dan belanja persediaan barang untuk konsumsi sepanjang tahun 2016.

Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	812.688.975	615.290.580	32,08
Belanja Barang Non Operasional	6.413.213.779	5.545.478.986	15,65
Belanja Persediaan Barang untuk Konsumsi	354.086.320	1.563.626.350	(77,35)
Belanja Jasa	2.026.527.816	1.005.726.622	101,50
Belanja Pemeliharaan	888.395.998	971.170.568	(8,52)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.076.103.073	13.757.446.063	(63,10)
Jumlah Belanja Kotor	15.571.015.961	23.458.739.169	(33,62)
Pengembalian Belanja	(38.641.455)	(8.906.000)	333,88
Jumlah Belanja	15.532.374.506	23.449.833.169	(33,76)

Belanja Modal

Rp1.426.463.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.426.463.000 dan Rp4.377.955.305. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar 67,42% dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh adanya *selfblocking* anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344.367.000	3.434.297.305	(89,97)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.082.096.000	943.658.000	14,67
Jumlah Belanja Kotor	1.426.463.000	4.377.955.305	(67,42)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.426.463.000	4.377.955.305	-67,42

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp344.367.000, mengalami penurunan sebesar 89,97 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp3.434.297.305. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya belanja modal peralatan mesin yang telah dibelanjakan pada TA 2015 guna persiapan menghadapi SE2016.

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.082.096.000 dan Rp943.658.000. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 14,67 persen dibandingkan Realisasi TA 2015. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari pembangunan rumah dinas eselon III sebanyak enam unit rumah.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan
Rp86.623.923

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp86.623.923 dan Rp6.153.874.556.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

Jenis	TH 2016	TH 2015
Barang Konsumsi	84.078.473	6.021.950.655
Barang untuk Pemeliharaan	2.545.450	4.452.950
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	110.474.900
Persediaan Lainnya	-	16.996.051
Jumlah	86.623.923	6.153.874.556

Pada tanggal pelaporan ada persediaan senilai Rp13.478.995 berada dalam kondisi usang yaitu spidol SP2010.

Tanah
Rp21.940.500.000

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BPS Provinsi Jawa

Tengah per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp21.940.500.000 dan Rp21.940.500.000. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal dari pembelian tanah di Tahun 2016. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2016

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nilai	Status Penguasaan Tanah
1	Jl. Pahlawan No. 6 Semarang	1.028	Rp 10.588.400.000	Pemerintah RI cq BPS
2	Jl. Klabat I Kel. Kaliwiro, Semarang	5.908	Rp 8.862.000.000	Pemerintah RI cq BPS
3	Jl. Bukit Raya No. 20, Semarang	342	Rp 767.400.000	Pemerintah RI cq BPS
4	Jl. Bukit Hijau No. 5 Semarang	206	Rp 375.500.000	Pemerintah RI cq BPS
5	Jl. Bukit Hijau No. 7 Semarang	203	Rp 370.250.000	Pemerintah RI cq BPS
6	Jl. Bukit Hijau No. 9 Semarang	205	Rp 373.750.000	Pemerintah RI cq BPS
7	Jl. Puspwarno Tengah VIII/18 Semarang	288	Rp 172.800.000	Pemerintah RI cq BPS
8	Jl. Menoreh selatan 28, Semarang	308	Rp 107.400.000	Pemerintah RI cq BPS
9	Jl. Bukit Hijau No. 11, Semarang	176	Rp 323.000.000	Pemerintah RI cq BPS
Jumlah		8.664	Rp 21.940.500.000	

*Peralatan dan
Mesin
Rp19.909.622.756*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp19.909.622.756 dan Rp24.746.068.911. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	24.746.068.911
Mutasi tambah:	
Pembelian	344.367.000
Transfer Masuk	206.937.500
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	(376.261.525)
Transfer Keluar	(5.009.439.130)
Usulan barang rusak berat ke pengelola	(2.050.000)
Saldo per 31 Desember 2016	19.909.622.756
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(15.952.493.408)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	3.957.129.348

a. Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:
Penambahan aset senilai Rp551.304.500 dengan rincian:

- Pembelian oleh BPS Provinsi Jawa Tengah senilai Rp344.367.000 berupa:
 1. Lemari kayu sebanyak 1 buah senilai Rp12.000.000.
 2. Brankas sebanyak 1 buah senilai Rp22.000.000.
 3. Meja kerja kayu sebanyak 4 buah senilai Rp15.240.000.
 4. Kursi besi/metal sebanyak 150 buah senilai Rp60.000.000.
 5. Meja komputer sebanyak 151 buah senilai Rp108.000.000.
 6. AC Split sebanyak 16 buah senilai Rp127.127.000.
- Transfer masuk berupa mesin absensi sebanyak 35 buah senilai Rp206.937.500.

b. Pengurangan aset senilai Rp5.387.750.655 dengan rincian:

- Penghentian aset dari penggunaan dan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya senilai Rp376.261.525 berupa:
 1. Kursi besi/metal sebanyak 1 buah senilai Rp1.310.122.
 2. *Unit Power Supply* sebanyak 3 buah senilai Rp6.534.288.
 3. PC Unit sebanyak 9 buah senilai Rp82.597.560.
 4. *Laptop* sebanyak 7 buah senilai Rp93.403.955.

5. *Scanner* sebanyak 3 buah senilai Rp6.150.000.
 6. *External* sebanyak 3 buah senilai Rp3.985.000.
 7. Hub sebanyak 1 buah senilai Rp2.600.000.
 8. Peralatan Jaringan Lainnya sebanyak 212 buah senilai Rp179.680.600.
- Transfer keluar BPS Provinsi Jawa Tengah ke BPS Kabupaten/Kota senilai Rp5.009.439.130 berupa:
 1. Printer sebanyak 33 buah senilai Rp406.560.000.
 2. *Scanner* sebanyak 35 buah senilai Rp822.391.430.
 3. *Firewall* sebanyak 35 buah senilai Rp3.249.457.200.
 4. *Switch* sebanyak 35 buah senilai Rp324.093.000.
 5. Mesin absensi sebanyak 35 buah senilai Rp206.937.500.
 - Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola berupa *scanner* sebanyak 1 buah senilai Rp2.050.000.

*Gedung dan
Bangunan
Rp15.278.493.635*

C.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp15.278.493.635 dan Rp14.598.654.294. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	14.598.654.294
Mutasi tambah:	
Pengembangan nilai aset	103.000.000
Pembangunan rumah dinas	979.096.000
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	(402.256.659)
Saldo per 31 Desember 2016	15.278.493.635
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(1.763.935.275)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	13.514.558.360

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari :

- a. Pengembangan nilai aset berupa penataan halaman rumah

dinas senilai Rp103.000.000.

- b. Pembangunan rumah dinas eselon III sebanyak empat rumah dinas senilai Rp979.096.000.

Sedangkan transaksi pengurangan berupa penghentian aset dari penggunaan senilai Rp402.256.659.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya
Rp769.017.904*

C.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp769.017.904 dan Rp670.128.608. Aset tetap tersebut buku publikasi BPS. Mutasi transaksi Tahun 2016, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	670.128.608
Mutasi tambah:	
- Relasifikasi masuk	98.889.296
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2016	769.017.904
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	0
Nilai Buku per 31 Desember 2016	769.017.904

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp17.716.428.683*

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp17.716.428.683 dan Rp15.884.691.610. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember

2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2016 dan 2015*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	19.909.622.756	15.952.493.408	3.957.129.348
2	Gedung dan Bangunan	15.278.493.635	1.763.935.275	13.514.558.360
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	769.017.904	0	769.017.904
Akumulasi Penyusutan		35.957.134.295	17.716.428.683	18.240.705.612

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud
Rp3.985.377.230*

C.6 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp3.985.377.230 dan Rp3.156.323.730.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada BPS Provinsi Jawa Tengah berupa *software kofax data capture* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor yaitu *software* yang digunakan untuk melakukan penerjemahan dari dokumen menjadi *image/gambar* kemudian diproses menjadi *database*. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	3.156.323.730
Mutasi tambah:	
Transfer masuk	829.053.500
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2016	3.985.377.230
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2016	(3.363.269.942)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	622.107.288

Mutasi tambah berupa transfer masuk software kofax dari BPS RI senilai Rp829.053.500.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Aset Lain-Lain
Rp853.171.311

C.7 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp853.171.311 dan Rp1.217.803.264. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	1.217.803.264
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	778.518.184
Mutasi kurang:	
- penghapusan BMN	(1.143.150.137)
Saldo per 31 Desember 2016	853.171.311
Akumulasi Penyusutan	(851.734.851)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	1.436.460

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan adalah dari reklasifikasi aset yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, yaitu:
 - *Unit power supply* senilai Rp6.534.288.
 - Kursi besi/metal senilai Rp1.310.122.
 - PC unit senilai Rp82.597.560.
 - Laptop senilai Rp93.403.955.
 - *Scanner* senilai Rp6.150.000.
 - *External* senilai Rp3.985.000.
 - Hub senilai Rp2.600.000.
 - Peralatan jaringan lainnya senilai Rp179.680.600.
 - Rumah Negara gol I tipe C senilai Rp321.639.791.
 - Rumah Negara gol II tipe D senilai Rp80.616.868.
2. Pengurangan adalah usulan barang rusak berat ke

pengelola, yaitu:

- Lemari kayu senilai Rp2.200.000.
- Rak besi senilai Rp12.250.000.
- Mesin absensi senilai Rp29.701.087.
- Kursi besi/metal senilai Rp1.310.122.
- *Unit power supply* senilai Rp8.712.384.
- Kabel senilai Rp11.972.050.
- PC unit senilai Rp147.340.340.
- Laptop senilai Rp221.277.267.
- Printer senilai Rp25.375.000.
- *Scanner* senilai Rp8.200.000.
- *Viewer* senilai Rp35.524.942.
- *External* senilai Rp3.985.000.
- *Server* senilai Rp49.500.000.
- Hub senilai Rp2.600.000.
- Modem senilai Rp252.086.
- Peralatan jaringan lainnya senilai Rp179.680.600.
- Rumah Negara gol I tipe C senilai Rp321.639.791.
- Rumah Negara gol I tipe D senilai Rp80.616.868.
- Serial lainnya senilai Rp1.012.600.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp4.215.004.793*

C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp4.215.004.793 dan Rp1.208.160.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset

Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	3.985.377.230	3.363.269.942	622.107.288
Jumlah	3.985.377.230	3.363.269.942	622.107.288
Aset Lain-lain	853.171.311	851.734.851	1.436.460
Jumlah	4.838.548.541	4.215.004.793	623.543.748

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp422.646.821*

C.9 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp422.646.821 dan Rp410.557.364, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA
2016 dan TA 2015*

Uraian	TH 2016	TH 2015
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	382.136.410	371.832.980
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	40.510.411	38.724.384
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	422.646.821	410.557.364

*Ekuitas
Rp40.480.227.404*

C.10 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp40.480.227.404 dan Rp54.979.944.389. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp30.586.289

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Informasi dan Cetakan Lainnya	1.271.200	4.631.700	(72,55)
Pendapatan Penjualan Lainnya	12.403.800	0	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	16.911.289	15.977.824	5,84
Jumlah	30.586.289	20.609.524	48,41

Pendapatan Penjualan Informasi dan Cetakan Lainnya berasal dari penjualan publikasi BPS Provinsi Jawa Tengah baik berupa buku maupun data. Sedangkan Pendapatan Penjualan Lainnya merupakan pendapatan dari penjualan kertas dokumen SUPAS2015 dan ST2013. Dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berasal dari pendapatan sewa atas kantin dan koperasi.

Beban Pegawai

Rp12.431.855.242

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp12.431.855.242 dan Rp11.825.503.287. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	12.406.959.242	11.825.503.287	4,92
Beban Tunjangan-tunjangan	-	-	0
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	0
Beban Lembur	24.896.000	-	0,00
Jumlah	12.431.855.242	11.825.503.287	5,13

*Beban
Persediaan
Rp519.597.615*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp519.597.615 dan Rp2.009.058.905. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	519.597.615	2.009.058.905	(74,14)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0,00
Jumlah	519.597.615	2.009.058.905	(74,14)

*Beban Barang
dan Jasa
Rp9.235.955.142*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp9.235.955.142 dan Rp5.556.973.770. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi

belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya Sensus Ekonomi 2016 pada bulan Mei 2016. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	791.036.975	457.127.660	73,05
Beban Langganan Daya dan Jasa	538.239.843	416.598.687	29,20
Beban Barang Non Operasional Lainnya	6.412.897.324	3.845.478.986	66,76
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0,00
Beban Jasa Konsultan	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	31.100.000	124.400.000	(75,00)
Beban Jasa Lainnya	1.462.681.000	713.368.437	105,04
Jumlah	9.235.955.142	5.556.973.770	66,20

*Beban
Pemeliharaan
Rp915.678.698*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp915.678.698 dan Rp1.010.989.31. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	344.646.841	298.231.105	15,56
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	543.749.157	613.252.463	(11,33)
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	27.282.700	99.505.750	(72,58)
Jumlah	915.678.698	1.010.989.318	(9,43)

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp5.056.573.073*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.056.573.073 dan

Rp13.748.540.063. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh adanya penghematan anggaran TA 2016. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	645.588.373	503.325.063	28,26
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	739.085.000	1.178.975.000	-37,31
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.608.539.700	7.428.934.000	-51,43
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	63.360.000	4.637.306.000	-98,63
Jumlah	5.056.573.073	13.748.540.063	-63,22

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp3.440.675.868*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.440.675.868 dan Rp3.213.343.671. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2016 dan 2015*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.557.386.263	2.910.036.393	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	295.962.528	292.883.512	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	2.853.348.791	3.202.919.905	-
Beban Amortisasi Software	212.828.726	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	374.498.351	10.423.766	-
Jumlah Amortisasi	587.327.077	10.423.766	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.440.675.868	3.213.343.671	-

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp94.813.945

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Penjualan Aset Non Lancar	27.356.666	(216.068.082)	(112,66)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional	68.029.779	7.142.290	852,49
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(14.051.495)	(71.213.450)	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	81.334.950	(280.139.242)	70,97

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp54.979.944.389

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp54.979.944.389 dan Rp41.901.968.688.

Defisit LO

Rp31.488.414.399

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar 31.488.414.399 dan Rp37.964.948.930. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp121.165.785. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp2.985.794.976*

E.3.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp2.985.794.976 dan Rp37.296.246. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp19.962.991.448*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp19.962.991.448 dan Rp51.201.386.662. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan dari Entitas Lain	29.380.389.318
Diterima dari Entitas Lain	(74.240.034)
Transfer Masuk	4.897.481.752
Transfer Keluar	(14.240.639.588)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	19.962.991.448

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp74.240.034 sedangkan DKEL sebesar Rp29.380.389.318.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.897.481.752.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp14.240.639.588.

Ekuitas Akhir

Rp40.468.726.462

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp40.468.726.462 dan Rp54.979.944.389.

